

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan bahwa pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Gorontalo berada pada kuadran 1 yakni strategi agresif. Strategi ini menekankan bahwa upaya peningkatan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Gorontalo dapat difokuskan pada kekuatan dari pemerintah dan masyarakat serta peluang dari berbagai pihak eksternal yang berkaitan dengan dana kelurahan tersebut. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh kelurahan-kelurahan di pesisir pantai Kota Gorontalo yakni (1) pembentukan kelompok modal melalui dana kelurahan secara bergulir, (2) peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir dari aspek kompetensi dan keterampilan dalam kegiatan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat pesisir (3) pembangunan sarana prasarana yang dapat meningkatkan PAD kelurahan, (4) meningkatkan kualitas (komitmen) baik bagi aparat kelurahan maupun masyarakat dan (5) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta terutama perbankan dan perusahaan yang berdiri di daerah pesisir

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pada simpulan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah

1. Bagi pemerintah kelurahan, sebaiknya terus mengoptimalkan kinerjanya dalam pengelolaan dana kelurahan terutama dengan penggunaan dana tersebut lebih difokuskan pada program pemberdayaan, sementara untuk pembangunan sarana dan prasarana lebih difokuskan pada anggaran APBD Kota Gorontalo. Program pemberdayaan sangatlah penting karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera.
2. Bagi pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya memberikan sanksi dan reward bagi kelurahan di daerah pesisir dalam pengelolaan dana kelurahan. Berbagai kerja sama dan program harus dioptimalkan bagi kelurahan di daerah pesisir karena kelurahan-kelurahan ini mampu memberikan kontribusi pada aspek pertanian dalam struktur PDRB Kota Gorontalo.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan menguji sejauh mana dampak dari besaran dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat atau munculnya kegiatan ekonomi produktif baru atau melakukan pengembangan analisis secara hierarki pada aspek-aspek penting dalam pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

- Aw, S. (2015). Implementasi Teori Komunikasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Integrasi Bangsa. *Informasi*, 45(1), 65-72.
- Biswan, A. T., & Agfi, N. M. (2020). Dana Kelurahan : Pemetaan Pada Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial. Desa dan Masyarakat*, 1(1), 9-15.
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 75-88
- Fathony, Aditya Achmad dan Asep Sopian. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September - Desember 2019 P-ISSN 2086-4159 E-ISSN 2656-6648
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29-34.
- Hamonangan, M. A. (2010). Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Hasanah, N. (2019) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14-25.
- Jumardi, J., Muhiddin, A., Hamrun, H., & Khaerah, N. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 30-35.
- Kaare, Svalastoga. 2014. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *EFISIENSI*, 15(3).
- Prasetyo, Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Dg. Pabalik; dan Wisang Candra Bintari. 2017. Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia*
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Rusdianto, D. (2017) Perencanaan Srategis Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat. *Media Informatika Vo. 12 No. 3. Hal. 33-37*
- Sugiarti, Sugianti . Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa/Ekasari Sugiarti. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Bandung*, 20Juli2017
- Sumadiasa, I. K., Tisnawati, N. M., & Wirathi, I. G. A. P. (2017). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7), 165225.
- Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa/Klurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kelurahan.

Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa/Klurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kelurahan.

Surya, A.(2018). Problematika Penyidik dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah. RESAM Jurnal Hukum, 4(1), 1-16.

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Widyawati, Ningtyas. 2013. “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. E-Jurnal.Vol.4.No.1.

<http://cakrawikara.id/2017/07/formulasi-dana-desa-yang-merata-berkeadilan-dan-berbasis-kinerja/> (Diakses Pada tanggal 31 July 2017)

<https://analisis.kontan.co.id/news/analisis-tentang-dana-kelurahan?page=all> (Di akses pada tanggal 22 Februari 2020 | 09:22 WIB)

<https://www.kompasiana.com/budisulis/5c089f0aaeebe135dc03f984/hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pengelolaan-dana-kelurahan?page=all> (Di akses pada tanggal 6 Desember 2018 11:01)

<https://www.bengkuluinteraktif.com/masyarakat-pesisir-dan-kemiskinan>